



Mewaspadaai Terorisme di Indonesia

Aryojati Ardipandanto^{*)}

Abstrak

Aksi teror kembali terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa penembakan/penyerangan terhadap personil POLRI di Solo, dan peristiwa peledakan bom di Depok. Berbagai pandangan disampaikan terkait peristiwa ini. BNPT memandang perlu untuk segera merevisi UU tentang Intelijen sehingga Intelijen dapat lebih leluasa untuk bergerak mencegah dan menanggulangi terorisme. Pemerintah berpandangan bahwa masyarakat harus lebih proaktif dalam mencermati tanda-tanda adanya kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya. Sementara itu, ada pandangan dari pengamat terorisme bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak lebih dari sekedar 'pengalihan isu' atas kondisi perpolitikan di Indonesia, yang dibuktikan dengan beberapa kegagalan atas kejadian-kejadian terorisme di Solo dan Depok tersebut. Namun, demikian, harus diakui bersama bahwa terorisme merupakan suatu ancaman yang harus diwaspadai. Semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun masyarakat harus bahu-membahu mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia.

A. Pendahuluan

Aksi teror kembali mendera Indonesia akhir-akhir ini. Namun target kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang lebih diarahkan pada rumah ibadah. Target dari serangan teroris akhir-akhir ini adalah para penegak hukum yaitu Anggota Kepolisian.

Kasus penembakan oleh orang yang tidak dikenal terjadi di Pos Polisi Plasa Singosaren, Solo, pada tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 WIB. Akibat kejadian ini, Briptu Dwi Data Subekti tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, anggota Densus 88 Briptu Suherman tewas saat Polisi melakukan penggrebekan di Jalan Veteran, Solo, pada tanggal 31 Agustus

2012 untuk menangkap tiga orang terduga teroris yang diduga terlibat dalam aksi teror sebelumnya.

Pelakunya adalah Farhan Mujahid dan Muchsin Tsani. Keduanya merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Direktur Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyuddin, meminta maaf apabila kedua Alumuni Ponpes tersebut sudah merugikan masyarakat. Dikatakan bahwa hal tersebut juga merugikan Pondok dan mencoreng nama Pondok Al Mukmin Ngruki. Padahal, Ponpes sama sekali tidak terkait dengan aksi teror. Fokus Ponpes adalah terkait masalah pendidikan dan dakwah.

^{*)} Peneliti bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com

Setelah itu, terjadi lagi peristiwa pengeboman di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara, Beji, Depok, Jawa Barat pada tanggal 8 September 2012. Tersangka pelaku, M. Thoriq, menyerahkan diri kepada Kepolisian Sektor Tambora, Jakarta. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat POLRI Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, penyerahan diri M. Thoriq itu bukan diatur, melainkan terjadi secara alamiah dan tidak terlepas dari upaya POLRI Anti Teror dalam mendekati keluarga M. Thoriq untuk ikut membantu agar tersangka menyerahkan diri.

B. Pandangan BNPT

Terkait dengan kejadian-kejadian terorisme yang kembali muncul di atas, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Nasional Teroris (BNPT), Irfan Idris, mengatakan bahwa target pada penegak hukum ini merupakan arah baru dari gerakan teroris yang muncul belakangan ini. Dikatakan bahwa sebelumnya yang menjadi target teroris adalah lambang asing. Sekarang arahnya berubah jadi semacam upaya balas dendam. Munculnya motif ini dikarenakan ada pemikiran bahwa para Anggota Kepolisian selama ini telah menghambat gerakan para teroris mencapai tujuan mereka bahkan menewaskan rekan-rekannya dalam penggrebekan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai, berharap agar UU Intelejen ini segera direvisi. Dengan demikian upaya memberantas aksi terorisme bisa berjalan secara maksimal. Menurut Ansyad Mbai, upaya memberantas teroris akan lebih maksimal jika UU mengizinkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan. Revisi UU ini akan membuat ruang bagi Intelejen untuk itu. Bahkan, Ansyad Mbai berharap agar UU tersebut kembali seperti zaman Orde Baru. Saat itu, aparat intelijen dan keamanan memiliki keleluasaan untuk menindak. Substansi revisi UU itu adalah supaya aparat keamanan bisa lebih proaktif.

C. Pandangan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, terorisme memiliki akar di Indonesia. SBY mengaskan pelaku aksi-aksi teror juga sudah ada di negara-negara lain. Mereka sudah ada sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001, bukan bermula sejak bom Bali pada 2002. Ditambahkan bahwa ekstremisme bukan hanya ada di Indonesia tapi juga ada di negara lain. Selain itu, ekstremisme juga tak hanya terjadi pada satu agama tapi juga ada di agama lain. Walau demikian, SBY mengakui ada proses radikalisisasi yang menyebar di dunia setelah terorisme pada 11 September 2001. Juga setelah ada operasi militer di Afghanistan maupun di Irak. Sejumlah negara memang tak tersentuh. Itu karena tidak ada akarnya dan tidak menjadi target teroris.

Presiden SBY melanjutkan pandangannya bahwa tidak ada negara yang benar-benar bebas dari terorisme, baik itu di Timur Tengah, Rusia, ataupun Filipina. Hal ini penting untuk dipahami bersama. Apalagi akar terorisme banyak sekali seperti keterbelakangan, kebodohan, maupun kemiskinan. Namun demikian, katanya, pelaku terorisme juga ada yang dari kelas terdidik maupun kelas menengah. Oleh karena itu, Presiden SBY berpendapat bahwa ada beberapa pendekatan, strategi dan kebijakan yang ada untuk terus dijalankan. *Pertama*, melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pendekatan persuasi dan bimbingan secara "habis-habisan". Presiden SBY menyatakan bahwa beliau telah berkali-kali meminta kepada pemuka masyarakat untuk secara gamblang, jelas, tanpa rasa takut dan malu-malu atau sembunyi-sembunyi untuk menjelaskan bahwa terorisme itu tidak dibenarkan.

Kedua, tindakan pencegahan itu dilakukan secara riil di lapangan. Hal itu bukan hanya menjadi tugas kepolisian, intelijen, komando teritorial, kepala daerah, tapi menjadi tugas semua komponen masyarakat. Masyarakat harus waspada, sensitif, dan melakukan kerja sama jika ada sesuatu yang ganjil. Sebagai

contoh, Presiden SBY menyebutkan paman Yayasan Yatim Piatu Pondok Pidara, yang tertera di depan rumah orang yang diduga menjadi pelaku terorisme di Depok. Masyarakat harus ikut mencermati, ada atau tidak kegiatan anak yatim piatu di situ. Jika semua pihak waspada dan sensitif sebenarnya gejala-gejala terorisme akan mudah dikenali.

D. Pandangan Pengamat

Indonesian Police Watch (IPW) menganggap janggal peristiwa penggerebekan kelompok teroris di Solo yang dilakukan Densus 88. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, ada tiga kejanggalan dalam penggerebekan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012. Kejanggalan *pertama*, pistol yang disita dari tertuduh teroris yang terbunuh adalah jenis Baretta dengan tulisan '*Property Philipines National Police*'. Padahal, sebelumnya Kapolresta Solo Kombes Asdjima'in menyebutkan senjata yang digunakan menembak polisi di Pos Pengamanan (Pospam) Lebaran adalah jenis FN kaliber 99 milimeter (mm). Pertanyaannya apakah orang yang ditembak polisi itu, benar-benar orang yang menembak polisi di Pospam Lebaran atau ada pihak lain sebagai pelakunya.

Kedua, Bripda (sekarang Briptu) Suherman, anggota Densus 88 tewas akibat tertembak di bagian perut. Ini menunjukkan anggota Densus 88 dalam bertugas yang bersangkutan tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang harus memakai rompi anti peluru. Pertanyaannya adalah apakah benar pada 31 Agustus 2012 malam itu, ada operasi Densus 88. Jika ada kenapa anggota Densus 88 bisa teledor bertugas tidak sesuai SOP.

Ketiga, beberapa jam setelah penyerangan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri segera meninjau tempat kejadian perkara (TKP). Padahal dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, hal itu tidak pernah terjadi, bahkan saat tiga kali penyerangan terhadap Pospam Lebaran itu, Presiden tidak bersikap seperti itu.

E. Penutup

Melihat berbagai pandangan atas kejadian terorisme di Indonesia di atas, tentunya dapat dipahami bahwa apapun sudut pandang yang disampaikan berbagai kalangan, tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme harus diwaspadai dan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari unsur Pemerintah maupun dari unsur masyarakat.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia antara lain *pertama*, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah. *Kedua*, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan. *Ketiga*, pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme. *Keempat*, penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal. *Kelima*, peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme. *Keenam*, sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme, dan *ketujuh*, pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (*soft approach*) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap.

Selain itu, Pemerintah harus senantiasa mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah *jihad* yang selama ini "disalahartikan".

Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara

itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antar-instansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan penerapan strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.

Rujukan:

1. "Terorisme ; Thoriq Menyerah karena Rindu Anak," *Kompas*, 11 September 2012.
2. "Thorik Berencana Bom Mako Brimob," *Media Indonesia*, 11 September 2012.
3. "Polisi Jadi Target Baru Teroris?," <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/08/18174437>, diakses 10 September 2012.
4. "2 Eks Santri Terlibat, Ponpes Ngruki Minta Maaf," <http://regional.kompas.com/read/2012/09/03/13033117/2>, diakses 10 September 2012.
5. "Terorisme punya akar di Indonesia," http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259773:terorisme-punya-akar-di-indonesia&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, diakses 10 September 2012.
6. "Penyergapan Teroris Solo Dianggap Janggal," <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/02/10374396/Penyergapan.Teroris.Solo.Dianggap.Janggal>, diakses 10 September 2012.